



PENGARUH SEKTOR BISNIS DALAM PENGEMBANGAN JARAK PAGAR DI KABUPATEN GROBOGAN

Gunawan Widodo

ABSTRACT

Perpetrator of distinguishable Policy become 2 that is Perpetrator of State and Perpetrator Socialize. Perpetrator of State consisted of the Functioner selected and the lifted Functioner. Functioner selected is Executive and Legislative. As for Perpetrator Socialize consisted of the Business Organization, Organizational of Research And Mass Media. Crisis of Oil which knock over world and also the growing of awareness of ending of reserve of oil will our, out for government exploit source of very energi abundance in this country. One of among other things exploitedly crop apart fence. Efficacy of PT Rajawali Nusantara Indonesia (a success RNI) exploit use of castor oil in production of sugar and really succeed to depress production cost, tried to be applied in broader scale that is createdly Desa Mandiri Energi. Cheaper beside, fuel from this biodiesel is also trusted friendlier of environment. Seed apart fence at former epoch also have been exploited as illuminator. Our Governmental specially Local Government of indigent still in recognizing its regional potency and exactly this opportunity be under arrest by PT RNI of private sector sector.

Keywords : *policy perpetrator, private sector, environmental friendly fuel*

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dan dunia saat ini sedang mengha-

Alamat Korespondensi :
MAP Undip
Telp : 024-8452791
Email : mapdialogue@yahoo.com

dapi krisis energi. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang melambung tinggi hingga mencapai 150 US dollar per barell membuat kepanikan seluruh negara dimuka bumi ini. Negara Indonesia sebenarnya

sangat kaya dengan bahan tambang termasuk minyak bumi dan bahkan pernah menjadi negara pengekspor minyak. Namun kondisi negara kita saat ini sudah sangat berubah. Kebutuhan BBM dalam negeri saat ini tidak dapat diucukupi oleh produksi dari dalam negeri sehingga kita harus mengimpor dari luar negeri.

Ditengah situasi krisis minyak dunia seperti saat ini maka pemerintah Indonesia dituntut untuk memanfaatkan alternatif sumber energi selain minyak bumi guna memenuhi kebutuhan BBM.

Sebagai negara yang berada di garis katulistiwa sebenarnya kita memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yaitu air dan pasang surut air, angin dan juga sinar matahari. Sayang sekali potensi alam yang demikian besarnya selama ini kita kurang memperhatikan, karena dinabobokan sumber energi yang berasal dari fosil.

Dari berbagai jenis sumber energi yang berasal dari fosil pun, selama ini kita hanya tergantung pada minyak bumi, sementara gas alam dan batu bara juga belum banyak kita manfaatkan.

Setelah negara kita dan dunia mengalami krisis energi, barulah kita berusaha secara maksimal untuk memanfaatkan berbagai potensi sumber energi yang kita miliki, khususnya yang berasal dari nabati yaitu kelapa sawit, tebu/tetes tebu, singkong, bunga matahari, biji kapuk dan jarak pagar (Prihandana, 2006 : 6).

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat memanfaatkan sumber energi lain selain minyak bumi, antara lain dengan melakukan konversi minyak tanah ke gas, penggunaan bio etanol dari bahan ketela pohon, penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit dan juga minyak jarak.

Untuk merangsang partisipasi sektor swasta guna mendukung pembangan bahan bakar nabati maka pemerintah juga telah mendorong peran serta sektor swasta. Salah satu perusahaan yang berusaha untuk memanfaatkan bakar nabati dengan mengolah biji jarak pagar adalah PT Energi Hijau Lestari (ENHIL). PT ENHIL merupakan salah satu anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Dengan melihat potensi yang ada di Kabupaten Grobogan maka PT RNI kemudian mendirikan sebuah pabrik pengolahan jarak pagar yang berlokasi di Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, yang diberi nama PT ENHIL. Kehadiran PT ENHIL ini berhasil menarik perhatian Pemerintah\ Pusat sehingga Lokasi PT ENHIL kemudian dijadikan Lokasi Pencangan Desa Mandiri Energi oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Maret 2007.

Dari kenyataan seperti ini maka dapat diketahui bahwa Sektor Swasta atau Dunia Usaha mempunyai peranan yang cukup besar dalam mempengaruhi proses kebijakan Pemerintah.

Permasalahan yang diajukan adalah : “Rendahnya kemampuan Pemerintah dalam menghadapi intervensi aktor kebijakan yang lain”

B. PEMBAHASAN

Kebijakan Negara menurut Thomas R Dye adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Howlett dan M Ramesh (1995 : 51-59) menyatakan bahwa aktor kebijakan merupakan *policy subsystem* yang berada dalam jejaring kebijakan dalam *organization of the international system, organization of the society* dan *organization of the state*. Aktor Kebijakan terdiri dari:

1. Pelaku Negara meliputi :
 - a. Pejabat yang dipilih, yaitu:

- 1) Anggota Eksekutif

Eksekutif atau Kabinet merupakan pemain kunci dalam Subsistem Kebijakan, Eksekutif memperoleh otoritas Konstitusional untuk memerintah Negara. Pelaku lain dalam proses membuat dan implementasi kebijakan cenderung bersandar pada eksekutif. Eksekutif mempunyai serangkaian Sumber Daya yang memperkuat posisinya yang berupa informasi, fiskal dan anggaran dan media massa yang bisa digunakan untuk mempublikasikan posisinya dan melemahkan lawannya. Eksekutif memiliki birokrasi yang melaksanakan kebijakan dan memiliki Sumber Daya untuk mengendalikan dan mempengaruhi kelompok dan media massa.

2) Anggota Badan Pembuat Undang-Undang (Legislatif)

Dalam sistem parlementer tugas legislatif adalah untuk membuat pemerintah akuntabel kepada publik. Fungsi ini juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan. Meskipun demikian sebagian besar Undang-undang yang diajukan oleh eksekutif dan hanya sedikit yang tidak. Keanggotaan legislatif diorganisasi dalam garis partai dan hanya memberikan peluang yang kecil bagi anggota legislatif untuk mengambil pendirian dan sikap yang independent.

Dalam sistem parlementer legislatif adalah milik partai yang memerintah dan selalu mendukung pemerintah.

b. Pejabat yang diangkat

Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan kebijakan dan administrasi publik secara kolektif disebut Birokrasi, fungsinya adalah untuk membantu eksekutif dalam melaksanakan kinerjanya (*Civil Servant* atau *Public Servant*), namun kenyataannya peran mereka melampaui dari yang diharapkan sebagai pembantu.

Kekuasaan dan pengaruh birokrasi didasarkan pada :

- 1) Undang-undang memberikan fungsi untuk dilaksanakan oleh birokrasi dan juga membuat keputusan atas nama Negara.
- 2) Memiliki akses sumber daya material yang besar untuk mengejar tujuan organisasi
- 3) Memiliki kecakapan dan keahlian yang terdiri kalangan professional dan tenaga ahli.
- 4) Memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai berbagai aspek sosial.
- 5) Kelanggengan birokrasi dan lamanya jabatan dari para anggotanya sehingga memberikan tempat melampaui atasannya yang dipilih.

2. Pelaku Masyarakat, meliputi:

a. Kelompok Kepentingan/ Organisasi Bisnis

Kelompok bisnis sangat berpengaruh terhadap kebijakan publik. bila Pemerintah tidak merespon tuntutan investor dan pemilik perusahaan maka sangat mungkin mereka memindahkan modal ke tempat lain. Hal ini akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan dan penerimaan

negara. Negara dengan pemerintahan yang kuat juga memiliki organisasi bisnis yang kuat agar dapat menekan pemerintah. Kekuatan organisasi bisnis dipengaruhi oleh struktur ekonomi negara yang bersangkutan

b. Organisasi Penelitian

Para peneliti (universitas) memiliki kepentingan teoritis dan filosofis dalam permasalahan publik, yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal ini biasanya berbeda dengan peneliti akademis karena kepentingan mereka lebih khusus dan tidak perlu mencari penyelesaian praktis terhadap permasalahan kebijakan.

c. Media Massa

Media Massa menempati posisi yang strategis diantara pemerintah dan masyarakat. Media massa juga berpengaruh kuat terhadap pemerintah dan masyarakat permasalahan publik dan penyelesaiannya. Peranan media massa dalam kebijakan terletak pada fakta bahwa dalam melaporkan masalah mengkombinasikan peranan pasif reporter dengan analisis aktif

sebagai suatu dukungan penyelesaian.

Berita dalam media masa sering memuat permasalahan publik dan penyelesaian yang diusulkan kadang dapat dimengerti oleh publik dan pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan dalam parlemen juga sering didasarkan pada pada berita dari media. Meskipun demikian peranan media ini tidak perlu dibesarkan karena sebagian besar pembuat kebijakan adalah individu yang cerdas dan memahami kepentingan dan gagasan mereka sendiri tentang pilihan kebijakan yang dapat dilakukan dan tidak mudah dipengaruhi oleh media.

Satu persatu pembahasan tentang aktor-aktor tersebut sebagai berikut :

1. Eksekutif

Secara umum Aktor dalam proses kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pelaku negara dan pelaku masyarakat. Sedangkan menurut Budi Winarno aktor kebijakan dapat dikelompokkan kedalam aktor resmi/internal birokrasi (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan aktor yang

tidak resmi yaitu media massa, kelompok think thank dan massa. (Winarno, 2002: 84)

Dalam kaitannya dengan Kebijakan pengembangan jarak pagar ini maka peran eksekutif sangatlah besar. Apalagi ketika isu ini berubah menjadi isu nasional dan berhasil mempengaruhi Presiden RI yang notabene adalah pucuk pimpinan tertinggi eksekutif di Indonesia. Keputusan yang diambil oleh Presiden RI tentu untuk pengembangan jarak pagar tentu saja akan berlaku dan juga berdampak nasional. Mengingat kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah (baik propinsi maupun kabupaten) kemudian harus pula mengambil kebijakan yang mendukungnya. Wujud nyata dari dukungan ini adalah adanya kebijakan-kebijakan di tingkat lokal berupa kegiatan pendampingan dan juga penyediaan anggaran melalui APBD.

2. Legislatif

Peranan Badan Pembuat Undang-Undang (DPR

ditingkat Pusat) dan juga DPRD di tingkat Propinsi dan Kabupaten sangatlah besar. Hal ini disebabkan karena Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Proses Pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, melibatkan 2 lembaga negara yaitu legislatif dan eksekutif. Meskipun demikian peran eksekutif dalam hal ini sangat dominan karena banyak sekali rancangan Undang-Undang atau Perda ini yang berasal dari eksekutif.

Proses perumusan kebijakan yang untuk pengembangan jarak pagar yang cenderung bersifat top down dan kurang sekali melibatkan usulan dari bawah (baik oleh Pemda maupun oleh DPRD), dalam kenyataannya membuat masyarakat dan pemda kurang siap. Terlebih lagi kebijakan ini bergulir ketika tahun anggaran sudah berjalan sehingga pada awalnya pemda dan masyarakat belum siap memberikan dukungan.

3. Sektor Swasta

Sektor swasta dapat juga memainkan peranan

yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Sektor swasta akan selalu berusaha agar sedapat mungkin mempengaruhi aktor kebijakan lainnya, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang dapat menguntungkan/mendukung kepentingan bisnisnya. Apa yang dilakukan oleh PT RNI dengan mengangkat potensi jarak pagar di Kabupaten Grobogan tidaklah terlepas dari kepentingan bisnisnya. Apalagi sebelumnya potensi besar ini masih belum disadari. Peluang inilah yang akhirnya ditangkap oleh RNI, sebuah Perusahaan milik BUMN untuk memanfaatkan potensi Kabupaten Grobogan banyak memiliki lahan tandus, kering dan gersang. Kondisi wilayah seperti ini ternyata menyimpan potensi yang sangat besar untuk budidaya tanaman jarak pagar, sebagai Bahan bakar alternatif sebagai pengganti BBM.

Ketika tiba-tiba RNI tahun 2007 memaparkan bahwa Kabupaten Grobogan saat itu memiliki ratusan hektar tanaman jarak pagar, sebagaimana masyarakat dan

Pemerintah Kabupaten Grobogan menjadi heran dan bertanya-tanya dimanakah keberadaan kebun tersebut? Data yang disampaikan oleh PT RNI tersebut bukanlah angka-angka kosong. PT RNI menemukan jutaan batang tanaman jarak yang digunakan sebagai pagar tanaman atau yang tumbuh liar ditanah-tanah kosong. Data tersebut kemudian ditotal dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu misal perkiraan jumlah tanaman perdesa atau per kecamatan yang terdapat tanaman jaraknya. Jumlah tersebut kemudian diakumulasikan sehingga menjadi jumlah tanaman jarak di Kabupaten Grobogan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya data tersebut dibagi dengan jumlah rata-rata tanaman jarak per hektar dalam pengelolaan secara intensif sehingga menjadi data jumlah tanaman jarak pagar di Kabupaten Grobogan (dalam Hektar).

Apa yang dilakukan oleh RNI selanjutnya sungguh mencengangkan. Data tersebut kemudian dipaparkan pada Menteri ESDM,

dan selanjutnya dipaparkan pula kepada Presiden SBY.

Ditengah isu kelangkaan BBM dan Krisis Energi Dunia maka wajar pula apabila pemerintah pun memberikan perhatian yang sangat besar pada pengembangan jarak pagar di Kabupaten Grobogan, walaupun tidak seheboh dengan kasus Blue Energinya - Joko Santoso. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran SBY untuk mencanangkan Desa Mandiri Energi. Adapun lokasi pencahangan bertempat di PT ENHIL yang terletak di Jalan Raya Purwodadi Blora atau tepatnya di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

Ibarat bola salju yang digulirkan maka mau tidak mau Pemerintah Kabupaten Grobogan harus menyediakan alokasi anggaran, menyiapkan kegiatan pendampingan, pelatihan petani dan penguatan kelompok. Apalagi pemerintah melalui Presiden SBY dalam kunjungan tersebut juga mengemukakan akan memberikan bantuan sebesar 10 Milyar

untuk Pengembangan Tanaman Jarak Pagar ini.

Dampak dari pencahangan ini adalah tumbuhnya perhatian Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas maka dapat diketahui bahwa Sektor swasta atau bisnis mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan oleh sektor swasta ini bukannya tanpa alasan karena sektor swasta mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan usahanya.

Manfaat yang diharapkan oleh RNI dalam pengembangan jarak pagar sebagai sumber BBM alternatif adalah berkaitan dengan kebutuhannya akan BBM guna menjalankan seluruh pabrik gula RNI. Dari upayanya untuk memproduksi sendiri bahan bakar dari minyak jarak ini maka ternyata berhasil menekan biaya produksi gula dari Rp 3.472/kg pada tahun 2001 menjadi 2.559/kg pada tahun 2004. (Prihandana, 2005 : vii) Disamping itu tampaknya RNI juga ingin sekali

memperoleh bagian “kue” dari anggaran untuk pengembangan *biofuel*, yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah, dengan menonjolkan apa yang telah dilakukannya.

Dari pengalaman keberhasilan PT RNI dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar mesin produksi gulanya tersebut, maka oleh Pemerintah kita konsep ini akan dicoba diterapkan dalam skope yang lebih luas yaitu dengan membuat masyarakat yang tinggal di desa terpencil dapat memperoleh minyak/energi dengan jalan memproduksinya sendiri. Konsep ini kemudian terkenal dengan nama Desa Mandiri Energi (DME). Agar DME ini dapat terwujud maka diperlukan tanah seluas 250 Ha, untuk ditanami dengan tanaman jarak. Hal ini sebenarnya tidaklah sulit untuk didapatkan karena tanaman jarak dapat tumbuh dengan baik pada tanah-tanah yang kritis, gersang dan tandus. Disamping itu tanaman jarak mudah didapat, ditanam dan dirawat (Prihanna : 2006:10) Apalagi pada zaman dahulu

biji jarak pagar juga pernah digunakan oleh nenek moyang kita untuk lampu penerangan.

4. **Media Massa**

Media massa termasuk salah satu aktor kebijakan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses kebijakn publik. Pemberitaan media massa seringkali menciptakan opini publik dan berhasil mempengaruhi aktor kebijakan yang lainnya. Contoh nyata hal ini antara lain adalah ekpose adanya kekerasan di IPDN, isu makanan berformalin, isu beredarnya daging glonggongan & makanan kadaluwarsa menjelang hari raya Idul Fitri dan juga penggunaan biodisel sebagai bahan bakar untuk menggantikan BBM yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Iklan yang ditayangkan oleh media cetak dan media elektronik tidak hanya berisi informasi mengenai cara pemanfaatan dan keunggulan energi biodisel saja tetapi lebih dari itu berhasil mencuri perhatian dan menanamkan nilai-nilai, dan mengubah perilaku masyarakat/para

pembaca serta penonton televisi untuk peduli dan mau memanfaatkan energi alternatif ini.

5. Kelompok Kepentingan

Baru baru ini kita dihebohkan oleh penemuan “blue energy”, yang mampu memanfaatkan air sebagai bahan bakar dan dapat menggantikan BBM yang berasal dari fosil. Belum usai heboh “blue energy”, bahkan akhirnya malah merambah ke ranah hukum karena sejumlah pihak merasa tertipu dan mengadukan sang penemunya ke polisi, tiba-tiba kita juga dikejutkan oleh kasus gagal panen yang dialami oleh Saudara kita, para petani di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.

Kedua contoh kasus tersebut jelas sekali berhubungan dengan kelompok kepentingan, dalam hal ini organisasi penelitian walaupun dalam hal ini bukanlah lembaga penelitian resmi yang dibentuk dan diawasi oleh negara. Pihak-pihak ini berusaha menerapkan hasil penelitian yang dilakukannya. Agar memudahkan dalam publikasi dan bernilai

jual yang tinggi meijakn yang lainnya mereka berusaha memanfaatkan aktor kebijakan yang lainnya yaitu eksekutif. Upaya yang sama sepertinya juga dilakukan oleh PT RNI dengan jalan melibatkan unsur eksekutif dalam pengembangan jarak pagar sehingga dapat berpengaruh secara luas dan mengundang perhatian masyarakat luas. Hal ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pencanangan Desa Mandiri Energi.

Ketika upaya bisnis yang menggandeng eksekutif ini gagal maka permasalahannya menjadi begitu menghebohkan karena yang terlibat adalah orang nomor satu di negeri ini. Dari kedua contoh kasus yang sempat menghebohkan masyarakat ini maka kita dapat mengetahui betapa besar sebenarnya pengaruh kelompok kelompok kepentingan (dalam hal ini kelompok penelitian) terhadap kebijakan negara.

Apabila dilihat dari kelima Aktor yang ada dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk pengembangan tanaman

jarak pagar, maka dapat kita ketahui bahwa ada 2 aktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kebijakan ini yaitu eksekutif dan kelompok kepentingan (dunia bisnis/sector swasta).

Diluncurkannya kebijakan ini, bukanlah semata-mata karena krisis energi dunia tetapi juga dilatarbelakangi oleh keberhasilan yang telah dilakukan oleh PT RNI. Hal ini adalah hal yang wajar karena ada 5 alasan bagi aktor kebijakan dalam melakukan perumusan kebijakan :

- a. Hasil pengamatan atau observasi aktor kebijakan terhadap implementasi kebijakan dan berupaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan.
- b. Terdapat hasil analogi dari suatu keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan dan para aktor kebijakan berupaya menerapkan dibidang lain yang sedang dihadapi.
- c. Hasil pengkajian dan penelitian para aktor terhadap persoalan tertentu, hubungan sebab akibat dengan mencari faktor-faktor pendorong

dan penghambat dari keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik.

- d. Komparasi dari suatu keberhasilan kebijakan publik di suatu wilayah dan kegagalan untuk kebijakan publik yang sama diwilayah yang berbeda.
- e. Komparasi dari suatu keberhasilan kebijakan publik di suatu waktu dan kegagalan untuk kebijakan publik yang sama diwaktu yang berbeda.
(Kismartini dalam Sri Suwitri, 2008:45)

Dalam pelaksanaannya program pengembangan jarak pagar ini kurang dapat meraih hasil yang optimal, disebabkan karena kesiapan masyarakat maupun pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kebijakan pengembangan jarak pagar ini lebih banyak bersifat "top down". Karakteristik kebijakan publik ada beberapa macam yaitu :

- a. Perumus alternatif kebijakan tidak perlu dibatasi 1 orang saja pelakunya. Untuk itu kemungkinan akan ada sedikitnya 2 orang atau kelompok

yang merumuskan usulan alternatif kebijakan yang saling bersaing.

- b. Perumusan alternatif kebijakan mungkin dimulai dengan tanpa definisi masalah yang jelas atau tanpa melibatkan kelompok sasaran yang berhubungan langsung, untuk memberikan pengaruh dalam proses perumusan alternatif kebijakan.
- c. Perumus alternatif kebijakan tidak perlu harus berjalan dengan institusi tertentu.
- d. Perumusan dan perumusan kembali alternatif kebijakan mungkin terjadi dalam periode panjang tanpa memperhatikan dukungan bagi usulan tertentu.
- e. Seringkali ada beberapa hambatan dari kelompok yang kalah dalam fase perumusan alternatif kebijakan. Hambatan ini dapat berkelanjutan hingga proses formulasi dan implementasi kebijakan.
- f. Proses alternatif kebijakan tidak pernah netral,

sarat nilai dan tidak hampa nilai.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Pelaku kebijakan terdiri dari pelaku negara (Legislatif, Eksekutif/ dipilih dan pelaku negara yang diangkat yaitu birokrasi) serta Pelaku Masyarakat yang terdiri dari Organisasi Bisnis, Organisasi Penelitian dan Media Massa.
- b. Keseluruhan pelaku kebijakan memiliki tujuan sendiri dan mereka berusaha mencapainya melalui partisipasinya. Namun proses atau cara mencapai tujuan tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
- c. PT RNI yang merupakan Organisasi Bisnis/swasta dapat menangkap peluang bisnis dan sekaligus dapat mempengaruhi pembuat kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menguntungkan kepentingan bisnisnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

- d. Dalam beberapa kasus seperti *blue energy*, padi super toy dan jarak pagar ini, ternyata sektor bisnis mempunyai peranan yang sangat kuat dalam mempengaruhi aktor kebijakan yang lainnya seperti eksekutif dan media massa.

2. Saran

Eksekutif dan Legislatif selaku aktor kebijakan harus dapat memainkan perannya secara bijaksana sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan kepentingan bisnis semata. Oleh karena itu harus dapat menjaga jarak yang ideal agar intervensi bisnis tidak berpengaruh secara luas dalam proses pengambilan kebijakan walaupun harus diakui pula bahwa pengaruh sektor swasta ini tidak dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Howlett, Michael. & M. Ramesh. 1995. *Studing Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford : Oxford University Press.

Prihandana, Rama. 2005. *Buku Saku Jarak Pagar*. Jakarta : Penerbit Rajawali Nusantara Indonesia.

Prihandana, Rama. 2006. *Desa Mandiri Energi (DME)*. Jakarta : Penerbit Rajawali Nusantara Indonesia.

Prihandana, Rama. 2006. *Menuju Desa Mandiri Energi (DME)*. Jakarta : Penerbit Proklamasi Publishing House.

Suwitri, Sri. 2008. *Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik*, Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro Semarang.